

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Pada bab-bab sebelumnya sudah dijelaskan dan dipaparkan dengan jelas mengenai dinamika perdamaian di Mindanao serta situasi dan kondisi di Mindanao. Panjangnya sejarah konflik yang terjadi di Mindanao, serta rumitnya permasalahan yang menjadi penyebab konflik di Mindanao juga telah dibahas di BAB I. Kebijakan-kebijakan presiden sebelum Benigno Aquino III menjabat juga sudah dijelaskan dan di paparkan dalam BAB II.

Penjelasan mengenai aktor-aktor serta kelompok-kelompok yang mempengaruhi situasi dan kondisi di Mindanao juga sudah dipaparkan dan dijelaskan di dalam BAB III. Begitu juga sikap-sikap kebijakan politik yang dibuat dan dipilih oleh Benigno Aquino III sudah di jelaskan di dalam bab IV. Kesimpulan dari BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV akan di paparkan dalam bab ini.

Permasalahan yang rumit dan kompleks di Mindanao yang berasal dari perbedaan identitas dan budaya dengan Filipina, yang kemudian Mindanao masuk dalam wilayah administratif negara Filipina. Hal tersebut menjadi pangkal permasalahan yang terjadi sampai saat ini. Munculnya kebijakan-kebijakan presiden sebelumnya yang berusaha untuk memarjinalisasi kelompok muslim di Mindanao,

serta terjadinya pembantaian terhadap umat muslim di Mindanao, memunculkan gerakan perlawanan dari Mindanao.

Kelompok perjuangan yang muncul seperti MNLF (*Moro National Liberation Front*) yang didirikan oleh Nur Misuari, yang kemudian muncul kelompok pecahan MNLF (*Moro National Liberation Front*), yaitu MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) yang dibentuk oleh mantan wakil MNLF (*Moro National Liberation Front*) yaitu Salamat Hasyim. Kelompok perjuangan lain seperti Abu Sayyaf Group yang justru menjadi kelompok teroris di Filipina dengan aksi penculikan dan pemboman menjadi masalah baru dalam konflik di Mindanao.

Kebijakan presiden-presiden yang sebelumnya menjabat mulai dari Manuel Quezon, kemudian Ferdinand Marcos sampai Gloria Macapagal Arroyo menghasilkan berbagai macam dampak *positive* maupun *negative* dalam proses perdamaian di Mindanao. Berbagai macam kesepakatan juga sudah pernah di bentuk, seperti Tripoli Agreement, Jeddah Accord untuk menyelesaikan konflik.

Kelompok-kelompok yang berada di Mindanao juga berpengaruh terhadap proses perdamaian, mulai dari Kristen Filipino yang merupakan orang-orang Visayas yang di transmigrasikan ke Mindanao, MILF (*Moro Islamic Liberation Front*), MNLF (*Moro National Liberation Front*) dan Abu Sayyaf Group. Kelompok-kelompok ini mempengaruhi proses perdamaian, ditambah berbagai macam kelompok pecahan baru dari MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) yang merasa sudah tidak sejalan dengan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*).

Berbagai macam kelompok yang menyebabkan situasi yang rumit di Mindanao, serta berbagai macam kebijakan yang pernah dibuat oleh presiden sebelumnya, menjadi pertimbangan presiden Benigno Aquino III dalam membuat kebijakan perdamaian di Mindanao. Proses perdamaian yang sudah di jalankan dan dibuat oleh presiden Arroyo yang menjabat sebelum Benigno Aquino III di teruskan dan dilanjutkan prosesnya.

Pentingnya sikap politik yang dibuat oleh Benigno Aquino III dalam menyelesaikan konflik di Mindanao menjadi hal yang sangat sensitif, karena bisa mempercepat proses perdamaian atau menghambat proses perdamaian tersebut. Sikap politik presiden Benigno Aquino III yang lebih mengedepankan *Soft Diplomacy* untuk mempercepat proses perdamaian di Mindanao.

Kebijakan-kebijakan yang di ambil dalam sektor militer, ekonomi, dan politik menjadi kebijakan yang sangat menentukan proses perdamaian. Kebijakan-kebijakan yang dibuat presiden Benigno Aquino III dalam upaya penyelesaian konflik benar-benar serius. Pertemuan intensif langsung antara pemerintah Filipina dan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) juga menjadi salah satu cara untuk menunjukkan keseriusan presiden Benigno Aquino III dalam menyelesaikan konflik di Mindanao.

Kebijakan dalam sektor militer untuk tidak menggunakan kekerasan dan senjata menjadi salah satu kebijakan yang mendukung proses perdamaian. Kebijakan tersebut mendukung program presiden Benigno Aquino yang tengah melakukan Formal Exploratory Talks dan juga penyusunan draft

perdamaian Mindanao. Pembentukan tim *Technical Working Groups* (TWGs) untuk membahas masalah isi perjanjian damai di Mindanao yang di implementasikan melalui program Sajahtera Bangsamoro.

Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari presiden Benigno Aquino dan proses implementasi perjanjian tersebut diawasi oleh tim satuan tugas yang dibentuk oleh presiden Benigno Aquino III melalui Administrative Order No.32. Sektor ekonomi menjadi salah satu sektor perdamaian yang mendapatkan perhatian dari presiden Benigno Aquino III

Mindanao yang menjadi daerah konflik mengalami berbagai macam masalah ekonomi yang dihadapi wilayah-wilayah konflik, seperti kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi. Kebijakan untuk menuntaskan kemiskinan mengembangkan ekonomi menjadi salah satu sikap politik yang dibuat oleh presiden Benigno Aquino III. Mindanao yang merupakan wilayah yang memiliki potensi kuat dalam pertanian menjadi kekuatan ekonomi yang dikembangkan dan didukung melalui kebijakan presiden.

Kebijakan Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) yang dibuat oleh presiden Benigno Aquino III untuk mempermudah para petani yang tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam. Peningkatan ekonomi di bidang pertanian serta meningkatnya arus transportasi udara menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi di Mindanao. Masuknya proyek-proyek investasi untuk mengembangkan Mindanao, juga untuk menyerap tenaga kerja sehingga bisa meminimalisir angka pengangguran.

Kebijakan politik dalam partisipasi masyarakat Mindanao di bidang politik juga dibuat oleh presiden Benigno Aquino III. Kebijakan dalam partisipasi politik, dimana pembentukan otonomi khusus di Mindanao serta pemilihan gubernur di Mindanao. Kebijakan untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) juga di atur dalam hukum dasar di Mindanao. Presiden Benigno Aquino yang menghargai keinginan politik masyarakat Mindanao yang ingin mengatur sendiri urusan rumah tangga politiknya, tentu saja masih dalam wilayah administratif Filipina.

Kebijakan-kebijakan politik yang dibuat oleh presiden Benigno Aquino III membuat masyarakat di Mindanao tidak merasa di tindas atau dijajah oleh pemerintah Filipina sendiri. Sehingga mempermudah proses negosiasi perdamaian yang ingin di capai antara pemerintah Filipina dan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*).

Berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh presiden Benigno Aquino III dalam bidang politik, ekonomi dan militer untuk mendukung proses perdamaian. Sehingga proses perdamaian yang ingin dicapai bisa lebih mudah dan lebih cepat terlaksana. Keseriusan yang ditunjukkan oleh presiden Benigno Aquino III dalam menyelesaikan konflik di Mindanao melalui *Soft Diplomacy* merupakan salah satu cara efektif untuk menyelesaikan konflik di Mindanao.